

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural”

PRAWACANA

Amsal Bakhtiar

The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue

WACANA

Gadis Arivia

Multikulturalisme: Re-imagining Agama

Ponijan Liaw

Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Merajut Perdamaian dalam Perspektif Agama Buddha

I Ketut N. Natih

Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu

Albertus Patty

Meretas Akar Konflik dan Kekerasan: Refleksi Protestan

BOOK REVIEW

A. Bakir Ihsan

Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VII, No. 1, 2005

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Said Agil H. Al-Munawwar
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarip

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlās

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Pre-discourse

- 1-10 **The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue**
Amsal Bakhtiar

Articles

- 11-20 **Multikulturalisme: Re-imagining Agama**
Gadis Arivia
- 21-30 **Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Merajut Perdamaian dalam Perspektif Agama Buddha**
Ponijan Liaw
- 31-46 **Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu**
I Ketut N. Natih
- 47-58 **Meretas Akar Konflik dan Kekerasan: Refleksi Protestan**
Albertus Patty
- 59-72 **Beragama yang Fanatik Tanpa Sikap Ekstrem**
Amsal Bakhtiar
- 73-86 **Manajemen Konflik Negara terhadap Masyarakat Multikultural: Kasus Komunitas Muslim Australia**
M. Amin Nurdin

Book Review

- 87-94 **Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih**
A. Bakir Ihsan

Document

- 95-112 **Upacara Slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang dalam Perspektif Multikultural**
M. Ikhsan Tanggok
- 113-126 **Merangkai Perbedaan, Merayakan Perdamaian: Telaah Konflik antara Pribumi dan Etnis Cina**
Ulfah Fajarini

AGAMA DAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

Fenomena kekerasan atas nama kepentingan kelompok, ideologi, bahkan atas nama agama masih juga tak lekang. Kekerasan yang dioperasikan baik melalui negara maupun melalui komunitas tertentu telah menghapus misi mulia kemanusiaan yang disuarakan oleh agama-agama. Ironisme agama dijadikan tameng untuk mengeruhkan suasana konflik yang terjadi. Kalau demikian, masih adakah harapan perdamaian yang dapat dipertaruhkan dari agama?

Semua agama hadir menawarkan perdamaian atau paling tidak dapat menjadi alternatif bagi sistem yang dianggapnya merugikan kehidupan sosial. Ajaran agung yang diwartakan agama telah menyesaki setiap masjid, gereja, sinagog, pure, vihara, klenteng, dan tempat persembahyangan lainnya. Masing-masing kitab suci telah diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa manusia. Agama hanyalah sebuah norma, aturan main, dan tatalaksana yang membutuhkan media, baik lembaga maupun perorangan. Begitu pun pengejawantahan misi perdamaian dalam agama, membutuhkan “tubuh” untuk membumikan dan menggerakkannya.

Inilah yang dilakukan oleh Master Chin Kung untuk membumikan ajaran langit perdamaian bagi kepentingan manusia di bumi. Atas komitmen dan perjuangan menegakkan perdamaian dunia yang digagas dan dipraktikkannya, Chin Kung bukan lagi sekadar sebuah nama, tapi telah menjadi ikon perdamaian yang lahir dari semangat keagamaan untuk kepentingan semua umat manusia. Universalitas perdamaian ditunjukkan oleh Chin Kung dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak bagi pengembangan sumber daya intelektual yang diharapkan menjadi benih bagi pewarisan nilai-nilai perdamaian. Ajaran mulia agama dijadikan Spirit untuk membantu orang-orang yang menghasrati dan berkomitmen bagi perdamaian tanpa terjebak pada sekat-sekat agama atau ideologi lainnya. Inilah yang ditelaah oleh Amsal Bakhtiar dalam tulisannya berjudul, *The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue*.

Atas semangat dan komitmen untuk menebarkan perdamaian, maka jurnal **Refleksi** kali ini menurunkan tema besar “Agama dan Perdamaian:

Perspektif Multikultural.” Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewariskan sisi filosofis dan genealogis serta kemungkinan-kemungkinan perwujudan perdamaian di bumi manusia yang pluralistis baik dari segi budaya, suku, bahasa, dan agama. Lebih dari itu, jurnal ini mencoba melihat sejauh mana peran agama-agama, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maupun Konghucu, dalam proses penciptaan perdamaian di tengah realitas yang multikultural. Agama yang dalam dirinya terkandung kebenaran mutlak harus berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang memiliki hak yang sama untuk eksis dan berinteraksi demi kedamaian di bumi. Dalam konteks ini Gadis Arivia mencoba merekonstruksi agama dalam perspektif multikulturalisme dengan meletakkan agama sebagai bentukan budaya. Menurutnya untuk memahami agama sebagai pijakan multikulturalisme harus diawali “oleh kesepahaman bahwa agama merupakan suatu realitas yang hadir dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru. Dengan demikian, komunalisme, yang menjadi pijakan bagi rekognisi identitas, harus dilebur demi mencairnya multikulturalisme dalam masyarakat. Perlu adanya rekognisi pluralitas atau politik perbedaan untuk menciptakan sebuah tata kehidupan yang saling menghargai dan bermartabat.

Terjadinya tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh beragam kepentingan, termasuk atas nama agama, lebih disebabkan oleh tidak adanya sinergi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ponijan Liaw melihat kunci persoalan yang harus diselesaikan demi tegaknya “damai di bumi” adalah dengan meretas aral yang mendistorsi ketiga pola hubungan tersebut. Dengan kata lain, krisis kemanusiaan yang lahir baik atas nama politik, kepentingan kelompok, maupun atas nama agama tidak akan pernah usai ketika manusia tidak mampu mencairkan pola hubungan yang harmonis antara dirinya dengan alam, manusia sekitar, dan pada dirinya sendiri, sehingga penghargaan agama terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak sekadar ajaran yang diagungkan, namun juga dirasakan.

Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam agama dapat dilihat dari perincian ajaran yang ada di masing-masing agama. Dalam Hindu, menurut I Ketut N. Natih ada ajaran yang disebut dengan *universalisme*, *tattvam asi*, *ahimsa*, *svadhes*, *moksa artham jagat hita ya ca iti dharma* dan sebagainya. Ajaran ini sekaligus mengajarkan tentang pentingnya penghargaan yang sebesar-besarnya atas fenomena multikulturalisme dalam

masyarakat. Universalisme dalam Hindu, menurutnya, merefleksikan paham bahwa semua agama itu sama dan benar. Tidak ada satu pun agama yang paling baik dan paling benar. Semua agama sama, tidak ada satu pun yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih luhur.

Perdamaian tidak identik dengan kesamaan dan kesatuan, namun lebih pada adanya hak pada setiap orang untuk menikmati kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan dengan sesama. Menurut Albertus Patten senjakala perdamaian yang sekaligus menjadi akar konflik di antara umat berbagai agama disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar dipilah dalam dua kategori, yaitu persoalan teologis dan non-teologis. Dari kedua sumber tersebut, yang utama adalah ketidaksiapan umat beragama untuk hidup dalam masyarakat dan dunia yang multikultural. Menurutnya, ketika rasionalitas gagal mewujudkan visinya dalam membangun peradaban manusia yang penuh damai, agama kembali ditantang untuk membuktikan peran profetiknya untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Itulah sebabnya dialog menjadi penting untuk membangun perdamaian itu. Dialog tersebut harus diletakkan dalam kerangka soteriologi, yaitu keselamatan, keselamatan manusia yang berisi kebebasan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan keselamatan bumi dan planet ini.

Ikatan umat beragama dengan ajaran agamanya sering dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya sekat-sekat sosial yang sekaligus dianggap sebagai duri bagi multikulturalisme. Menurut Amsal Bakhtiar dalam beragama setidaknya ada variabel yang harus dipahami dan disikapi secara proporsional, yaitu 'fanatik' dan 'ekstrem'. Kedua istilah ini memiliki implikasi yang berbeda dalam sikap keberagamaan. Fanatik yang dimaksud adalah sikap beragama yang saleh dan taat dalam menjalankan ibadah, yang termanifestasi dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun ekstrem adalah sikap beragama yang lebih literal, cenderung ideologis, dan eksklusif. Sikap eksklusif ini pada akhirnya dapat menjurus pada semangat komunalisme agama dan ideologisasi agama, sehingga yang muncul ke permukaan bukan agama yang sebenarnya, tetapi agama yang sudah terbungkus oleh berbagai kepentingan distorsif, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Konflik sesungguhnya bisa ditata menjadi energi yang positif bagi masyarakat yang multikultural. M. Amin Nurdin mengangkat kasus (negara) Australia dalam memanager konflik yang terjadi dalam masyarakatnya. Realitas sosial penduduk Australia yang beragam kultur, etnis, dan

agama sebagai implikasi terbukanya kebijakan imigrasi di tahun 1960-an telah mendorong pemerintah Australia untuk melakukan rekayasa sosial politik dengan menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredusir konflik nilai dan norma yang saling bertentangan antara masyarakat, kulit putih di satu pihak dan para pendatang di pihak lain. Implikasi multikulturalisme, tampak pada perkembangan komunitas muslim Australia -dan komunitas etnis dan agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga tetap *survive* hingga hari ini, meski tetap dicurigai memiliki potensi konflik.

Energi agama dalam merayakan multikulturalisme dapat dilihat pula dalam upacara slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang yang dilakukan oleh orang-orang Cina atau Tionghoa yang menganut agama di luar Islam di Jawa. Menurut M. Ikhsan Tanggok upacara *slametan* dalam rangka membangun kembali gua Sam Poo Kong di klenteng Sam Poo Kong di Semarang, tidak sekadar upacara suci, tapi juga sebagai wadah mempertemukan dan mempersatukan dua kelompok suku bangsa yang berbeda secara kultur untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat.

Mengharapkan peran agama dalam mewujudkan perdamaian mengharuskan adanya kesepahaman pemeluknya terhadap ajaran agamanya, dan kesepahaman antar umat beragama itu sendiri. Dalam *Book Review*, A. Bakir Ihsan melihat adanya korelasi antara pemahaman keagamaan seseorang dengan sikapnya terhadap agama lain. Pemahaman yang eksklusif terhadap agama telah memicu lahirnya egosentrisme keberagamaan yang menganggap agama lain sebagai yang salah. Sikap ini terutama dipicu oleh orientasi *fiqhiyyah* yang cenderung hitam putih dan menafikan kebenaran yang lain. Orientasi *fiqhiyyah* yang bias inilah yang perlu direkonstruksi sehingga pemahaman sepihak dan eksklusif terhadap agama bisa mencair yang pada akhirnya akan meretas kebekuan interaksi antar umat beragama yang selama ini sering menjadi benih tragedi kemanusiaan yang tidak perlu. Dan inilah tema besar yang hendak diusung oleh jurnal ini bagi kepentingan perdamaian di muka bumi yang kita pijak bersama. Semoga!

Jakarta, April 2005
Redaksi

MULTIKULTURALISME: RE-IMAGINING AGAMA

Gadis Arivia

Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia
gadis.arivia.e@gmail.com

Abstract: *The foundation of multiculturalism, based on identities created from free choices, assumes that firstly, religion must be viewed as a cultural construct, a reality originating from various texts that seek to create new meanings and imaginations. In a society where multiculturalism is not embraced, the resulting form of society is communalism. Such a society prioritizes identity politics (identity recognition) over difference politics (pluralism recognition).*

Keywords: *Multiculturalism, Religious Identity, Identity Politics, Culture.*

Abstrak: Pijakan multikulturalisme yang berangkat dari identitas-identitas yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan bebas mengandaikan bahwa pertama-tama agama harus dipandang sebagai bentukan budaya, suatu realitas yang berangkat dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru. Negara yang masyarakatnya tidak dilandasi oleh semangat multikulturalisme, maka bentuk masyarakat yang dicapai adalah komunalisme. Masyarakat yang demikian mementingkan politik identitas (rekognisi identitas) bukan politik perbedaan (rekognisi pluralitas).

Kata Kunci: Multikulturalisme, Identitas Agama, Politik Identitas, Budaya.

Tumbangnya Modernitas

Modernitas terbukti bagaimanapun canggihnya abad Pencerahan dari Eropa yang membawa rasionalitas dalam sejarah peradaban dunia ternyata gagal total. Modernitas pada suatu masa mendominasi dunia lewat kolonialisme dan masih mempunyai dampak yang besar pada negara-negara post-kolonial. Modernitas mendikte cara berada manusia secara universal dan memosisikan diri sebagai modus eksistensi yang superior, yakni eksistensi dunia Barat.

Kritik terhadap modernitas bertubi-tubi telah diajukan banyak filsuf kontemporer terutama oleh Jean Francois Lyotard. Ada tiga hal yang menurutnya modernitas tidak sesuai lagi dengan kondisi kontemporer. *Pertama*, ide tentang progresivitas, rasionalitas, Obyektivitas ilmiah yang dilegitimasi oleh Barat tidak lagi dapat diterima karena sama sekali tidak mempertimbangkan perbedaan-perbedaan budaya. *Kedua*, tidak ada hierarkis nilai *high* dan *low* dalam seni dan budaya. Semua hierarki ditebas oleh budaya pop. *Ketiga*, tidak ada lagi yang membedakan antara *copy* dengan *real*, yang alami dengan yang artifisial, era teknologi telah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, yakni menciptakan realitas-realitas —tidak ada lagi realitas terberi.¹ Kritik terhadap modernitas tentu memberi kemenangan terhadap perbedaan dan pluralisme. Budaya marginal menguat, logosentrisme tersingkir dan sekularisme ditantang.

Penentangan terhadap sekularisme terasa sekali dalam perdebatan pemikir-pemikir Islam seperti pada Heba Raof Ezzat dan Ziauddin Sardar. Kedua tokoh ini pada dasarnya mengakui bahwa perlawanan dunia Islam kepada Barat adalah karena hegemoni dunia Barat. Barat tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *otherness* dunia Islam sehingga Islamofobia merajalela. Di lain pihak, rasa dikucilkan dan diabaikan telah membentuk suatu sikap intoleransi di sebagian kelompok Islam. Bagaimana

menghadapi fenomena baru ini? Pendekatan keamanan dengan slogan *the war on terror* kelihatan lemah dan bertambah masalah, pendekatan kebudayaan multikultural tampaknya lebih menjanjikan. Namun mam-pukah multikulturalisme berbicara soal agama? Pijakan multikulturalisme yang berangkat dari identitas-identitas yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan bebas mengandaikan bahwa pertama-tama agama harus dipandang sebagai bentukan budaya, suatu realitas yang berangkat dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru.

Modus Baru: *Otberness*

Modus studi kultural terbaru tidak lagi berkonsentrasi pada membaca budaya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan negara atau dalam posisi berseberangan dengan kekuasaan yang dominan. Perubahan paradigma ini sebenarnya dimulai dari arus pemikiran feminisme yang mengafirmasi bahwa ada cara berada “yang lain” (*other*).² Penekanannya bukan lagi komunitas-komunitas berhadapan dengan blok kekuasaan besar akan tetapi sebagai komunitas yang terbentuk sebagai kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau kelompok sub-sub kultur dari ragam etnik dan kelompok perempuan yang komit terhadap *me-maintenance* dan mengelaborasi nilai-nilai, identitas dan etika yang otonom. Model ini tidak diberi fondasi yang universal yang memakai rasionalisme sebagai dasar serta basis-basis institusional akan tetapi lebih pada fondasi komunitas-komunitas kecil berdasarkan etnisitas, gender dan seksualitas: melakukan aliansi “pelangi”, identifikasi *cross-cultural*, tujuan-tujuan “politik-mikro”, di mana relasi antara kelompok-kelompok ini memakai konsep “dialogis” (Mikhail Bakhtin) dan “*otberness*” dari setiap peserta yang berinteraksi tetap masing-masing menjadi utuh. Model ini menjamin keutuhan kelompok yang tidak dapat disentuh oleh pemerintah yang lebih mengedepankan monokulturalisme dan mengabaikan pluralitas dan “perbedaan”.

Studi kultural yang mengafirmasi “*otberness*” dan negasi terhadap meta-diskursus harus dimengerti dalam kerangka akselerasi globalisasi dari produksi dan distribusi budaya sejak tahun 1970-an. Argumen-argumen ini bisa kita lihat terutama dalam karya Gayatri Spivak yang menunjukkan globalisasi telah diserbu dengan *multidirectional*, dan dalam hal tertentu mengakibatkan sebuah “*breakdown*” antara dunia pertama versus dunia ketiga.

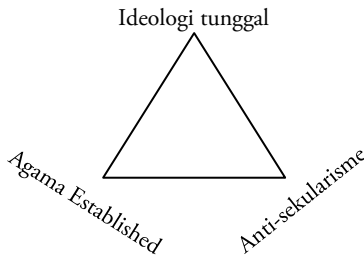
Misalnya dalam globalisasi media tentu mempunyai konsekuensi yang signifikan yakni akselerasi dan konsentrasi dari industri budaya karena akibat dari *market global* yang menaikkan investasi pasar dan distribusi. Sebagai contoh, pada tahun 1990, industri rekaman menjadi “Oligopoli” dari Eropa, Amerika dan Jepang. Konsekuensi globalisasi yang lainnya adalah pemiskinan dunia ke-3 yang tidak dapat bersaing karena warisan-warisan pemikiran sebagai masyarakat terjajah dan praktik-praktik pemerintahan yang feodalistis (korupsi), serta degradasi ekologi. Namun di lain pihak globalisasi juga telah membawa diversitas dan otonomi—*men-set up* media-media industri lokal sebagai kekuatan (Bollywood, Aljazeera). Dalam hal ini multikulturalisme memainkan peranan yang penting.

Multikulturalisme dan Agama

Di manakah letak agama dalam sebuah masyarakat yang dilandasi semangat multikulturalisme? Dalam tulisan Malory Nye tentang *Multiculturalism and Minority Religions*, 2001, ia menegaskan bahwa posisi agama dalam multikulturalisme harus pertama-tama mengasumsikan adanya kebebasan dalam mempraktikkan agama apa pun “*Mult religionism*” yang diproduksi oleh berbagai budaya, oleh karenanya, agama dalam hal ini perlu dipikirkan ulang sebagai pandangan yang terbuka dan bukan yang esensialistik.³

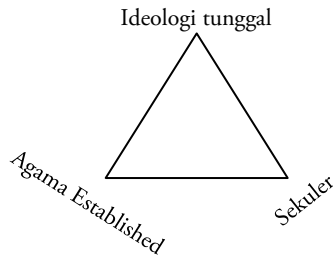
Pandangan agama yang esensialistik biasanya didukung oleh sebuah masyarakat yang digerakkan oleh ideologi tunggal dan tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Dalam hal ini agama menjadi esensial dan mendikte jalannya negara:

“Model 1: esensialistik dan supremasi agama”



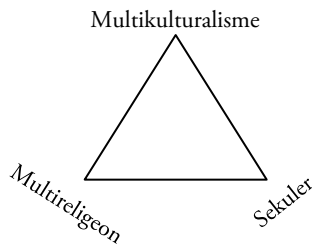
Sedangkan posisi agama dalam pandangan esensialistik namun berada dalam wilayah sekuler menggunakan agama sebagai alat negara:

“Model 2: esensialistik dan supremasi negara”



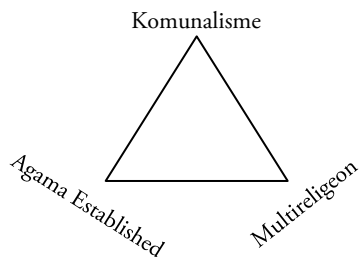
Model agama yang tumbuh dalam alam multikulturalisme adalah model yang menekankan multireligionitas dan tetap berada di wilayah sekuler. Agama diyakini sebagai tindakan individu dan merupakan ritual budaya yang tetap dipelihara namun tidak esensial.

“Model 3: agama non-esensialistik /semangat multikulturalisme”



Sedangkan model agama yang menekankan multi-agama tapi tidak dalam wilayah semangat multikulturalisme adalah:

“Model 4: agama esensialistik/semangat multi-religi/nonmultikultural”



Pada keempat model yang diperlihatkan di atas model 1 dan 2 memperlihatkan adanya antara dua kekuatan agama atau negara, artinya, bisa dijadikan manipulasi oleh agama atau negara. Sedangkan pada model 3

dan 4 terjadi iklim multi-agama namun model 3 dikomando oleh multikultural dan keharusan negara yang sekuler sedangkan model 4 dikomando oleh komunal yang terus menerus terjadi tarik menarik antara sekularisme dan anti-sekularisme.

Politik sekularisasi memang sepanjang sejarah menunjukkan adanya kepentingan sejak zaman Pencerahan di abad ke 17 di dunia Barat. Menurut Peter van der Veer:

“In discourses about modern society from the Enlightenment onwards one finds a strong concern with the neutrality of the state in relation to religious belief and Organization”.⁴

Teori sekularisasi sebagai strategi politik memberikan alasan rasional untuk membuat masyarakat yang konformis dan mengembangkan nilai-nilai ekonomi kapitalis. Bisa dikatakan bahwa kepentingan sekularisasi bagi negara-negara Barat terutama adalah untuk menjamin ekonomi yang kuat dan stabil. Kepentingan sekularisasi yang menekankan multikulturalisme berkembang lebih lanjut membentuk masyarakat yang plural.

Sementara di negara yang masyarakatnya tidak dilandasi oleh semangat multikulturalisme maka bentuk masyarakat yang dicapai adalah komunalisme. Masyarakat yang demikian mementingkan politik identitas (rekognisi identitas) bukan politik perbedaan (rekognisi pluralitas). Politik identitas berusaha untuk memastikan ada *“established”* agama dan bukan *“diestablishment”* agama. Politik identitas yang akhirnya berujung pada fundamentalisme sebenarnya dijelaskan oleh Deepak Naik, *public relation* dari NCHT (National Council for Hindu Temples) sebagai berikut:

“People of minority faiths need to be interwoven into the political body: as members of parliament, in the civil service, in dotted-line relationships parallel to Ministers of Parliament. Enabling them to be involved in the decision-making processes would mean that instead of being starved or neglected, minority cultural and religious needs and values would begin to fulfilled... (They) will not achieve a sense of belonging until true partnerships are created, established, and supported to make each partner equal to the other”.⁵

Apa yang ingin dikatakan oleh Naik bahwa tidak ada jalan lain untuk menghindari kekerasan agama selain mempraktikkan multisiplitas identitas dan bentuk-bentuk budaya yang didasari oleh politik perbedaan.

Rekognisi Pluralitas

Rekognisi merupakan wacana yang dikembangkan pada politik kontemporer. Kebutuhan untuk ini pada awalnya didasarkan pada pembentukan kekuatan demi pergerakan politik nasional. Kini, kebutuhan telah berubah menjadi pembentukan kekuatan kelompok “*subaltern*” (atas nama kelompok minoritas), atau bentuk-bentuk feminisme atau yang disebut politik multikulturalisme.

Politik rekognisi telah banyak dibahas oleh Charles Taylor. Ia menganggap bahwa terdapat hubungan antara rekognisi dengan identitas, di mana pengertian yang terakhir mengandaikan sebuah pemahaman “siapa mereka”, definisi fundamental mereka sebagai manusia. Tesis pemikiran ini adalah bahwa identitas dibentuk oleh rekognisi atau tanpa rekognisi, sering-kali terjadi *misrecognition of others*, dan bila hal ini terjadi seseorang atau kelompok dapat mengalami kerugian distorsi—Mis-rekognisi dan Non-rekognisi membawa mereka pada perasaan tertindas, terpenjara, terdistorsi dan tersepelekan.⁶

Signifikansi politik rekognisi sepanjang sejarah berubah dari kepentingan untuk menekankan *individualized identity* (sesuatu yang membentuk diri saya sendiri berdasarkan keyakinan kebenaran yang menurut saya universal-yang didapatkan secara metafisis), hingga kesadaran bahwa realitas dibentuk oleh “teks”, bahasa yang mengidentifikasi diri kita sendiri. Modus ekspresi yang kita gunakan dipelajari dari “*others*” melalui bahasa dan interaksi bahasa satu dengan yang lainnya atau yang disebut oleh George Herbert Mead sebagai *significant others*. Dasar karakter pemikiran manusia bukan monologis namun dialogis.

Cara berada monologis mengandaikan bahwa segala sesuatu harus dihubungkan dengan “asal usulnya”, “siapa saya” dan “dari mana saya”. Hal tersebut menjadi pedoman dalam kehidupannya dan mengabaikan aspek dialogis kehidupan manusia yang sesungguhnya membentuk identitas diri. Jadi, menemukan identitas diri bukan berarti dilakukan lewat tersendiri, terpisah (isolasi), akan tetapi lewat negosiasi, dialog dengan “yang lainnya”.

Charles Taylor lebih lanjut memperlihatkan dua level wacana rekognisi. Pada level pertama yakni privat, terdapat pemahaman pembentukan identitas dan diri melalui dialog dan perjuangan bersama *significant others*. Kedua, pada level publik di mana politik rekognisi harus memainkan peranan yang besar untuk memastikan adanya *equal recognition* di semua

lini kehidupan publik.⁷ Para feminis sebenarnya telah lama memainkan dua level ini dengan diktum terkenal mereka “*The private is political*”.

Artinya, dalam tataran multikulturalisme yang memasukkan politik inklusi dan toleransi harus mengakui persoalan ras, etnik, gender dan perbedaan seksual dan mengakomodasikan pada sistem politik, namun, menurut Saba Mahood dan Nancy Reynolds masih tersisa problem pada agama yaitu:

- 1) Rekognisi pada perbedaan agama dan mempraktikkannya di level publik membuat mereka yang menganut identitas *multiple* berdasarkan pijakan sekuler menjadi tidak nyaman,
- 2) Ketidak-nyamanan ini terjadi karena agama-agama tertentu merepresentasikan diri dengan dominan, opresif dan penuh kekerasan,
- 3) Memberikan ruang pada agama dalam isu-isu publik berbenturan dengan humanisme liberal yang telah menetralsir diskusi agama dalam politik modern.

Pada dasarnya multikulturalisme sama sekali tidak berseberangan dengan kehidupan keagamaan-walaupun ada risiko ekspresi fundamentalis yang menerjemahkan identitasnya secara esensial. Karena multikulturalisme kritis merupakan juga atau bagian juga dengan multireligionisme.

Bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik?

Tidak ada cara lain untuk mendekati agama dari proses *hybrida* dan sinkretis (dalam rangka menciptakan makna-makna baru) yang dikonstruksi secara kultural, etnisitas dan gender. Dibutuhkan keberanian melakukan *re-imagining* agama. []

Catatan Kaki

1. Lyotard, *Defining the Postmodern*, 1986.
2. Simon During, "Introduction", *The cultural Studies Reader*, Routledge, 2003, 13.
3. Malory Nye tentang *Multiculturalism and Minority Religions in Britain*, Curzon Press, 2001, 7.
4. van der Veer dalam Nye, *Multiculturalism and Minority Religions in Britain*, Curzon Press, 2001, 257.
5. Deepak Naik, *A Hindu Perspective, in Church, State and Religious Minorities*, ed. T Modood, PSI, 1997, 79-80.
6. Charles Taylor, *Multiculturalism*, Princeton University Press, 1994, 25.
7. *Ibid*, 37.

Daftar Pustaka

- During, Simon. "Introduction", *The cultural Studies Reader*, Routledge, 2003.
- Lyotard, *Defining the Postmodern*, 1986.
- Naik, Deepak. *A Hindu Perspective, in Church, State and Religious Minorities*, ed. T Modood, PSI, 1997.
- Nye, Malory. *Multiculturalism and Minority Religions in Britain*, Curzon Press, 2001.
- Taylor, Charles. *Multiculturalism*, Princeton University Press, 1994.
- Veer, van der in Nye, *Multiculturalism and Minority Religions in Britain*, Curzon Press, 2001.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004